

Multikulturalisme dan Ketahanan Sosial: Strategi Integrasi Nasional dalam Konteks Perubahan Sosial di Ambon dan Sanggau

Musdalipa Mudalipa¹, Eliza Meiyani², Munirah Munirah³, Fadhil Hayan Mochammad⁴

¹Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

Dikirim;5-8-2025 Direvisi; 14-1-2026, Diterima; 19-01-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze national integration strategies in strengthening social resilience in post-conflict multicultural regions, with case studies in Ambon City (Maluku) and Sanggau Regency (West Kalimantan). These two regions were selected because they have different social conflict backgrounds, but both represent integration challenges in the context of ethnic, religious, and local cultural diversity. The research employs a qualitative approach using secondary data analyzed with NVivo 12 Plus software through thematic analysis techniques. The findings reveal that national integration in Ambon has been successfully driven by the synergy between state interventions, such as peace education and interfaith harmony forums, and the revitalization of local Pela Gandong values as a social instrument for reconciliation. Conversely, in Sanggau, integration strategies tend to be top-down and have not fully accommodated Dayak customary law values, making social resilience vulnerable to agrarian conflicts and cultural exclusion. This study concludes that the success of national integration depends heavily on substantive recognition of local values and collaboration between the state and society. Recommendations include strengthening culture-based policies, designing contextual multicultural education, and actively involving customary institutions in the social development process

Keywords: *Multiculturalism; National Integration; Social Resilience; Local Values, Post-Conflict.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi integrasi nasional dalam memperkuat ketahanan sosial di wilayah multikultural pascakonflik, dengan studi kasus di Kota Ambon (Maluku) dan Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat). Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki latar belakang konflik sosial yang berbeda namun sama-sama merepresentasikan tantangan integrasi dalam konteks keberagaman etnis, agama, dan nilai budaya lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus melalui teknik analisis tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nasional di Ambon berhasil didorong oleh sinergi antara intervensi negara, seperti pendidikan damai dan forum kerukunan umat, dan revitalisasi nilai lokal Pela Gandong sebagai instrumen sosial rekonsiliasi. Sebaliknya, di Sanggau, strategi integrasi cenderung bersifat top-down dan belum mengakomodasi secara penuh nilai-nilai hukum adat Dayak, sehingga ketahanan sosial rentan terganggu oleh konflik agraria dan eksklusi budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan integrasi nasional sangat bergantung pada pengakuan substantif terhadap nilai lokal serta kolaborasi antara negara dan masyarakat. Rekomendasi mencakup penguatan kebijakan berbasis budaya, desain pendidikan multikultural kontekstual, dan pelibatan aktif lembaga adat dalam proses pembangunan sosial.

Kata Kunci: *Multikulturalisme; Integrasi Nasional; Ketahanan Sosial; Nilai Lokal; Pascakonflik,*



PENGANTAR

Indonesia merupakan negara multikultural yang dihuni oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah (Muslem 2024). Realitas sosiokultural ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu laboratorium sosial terbesar di dunia dalam hal keberagaman (Fauzi et al. 2025). Multikulturalisme di Indonesia bukan sekadar kondisi demografis, melainkan sebuah tantangan dan peluang ideologis dalam membangun integrasi nasional (Gianyar and Suacana 2024). Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman yang kaya ini dapat memicu eksklusi sosial, marginalisasi kelompok minoritas, hingga konflik horizontal yang mengancam kohesi bangsa. Dua peristiwa penting yang mencerminkan kegagalan manajemen keberagaman adalah konflik komunal di Kota Ambon pada 1999–2002 dan konflik etnis di Kabupaten Sanggau pada 1997–2001 (A. N. Hasudungan 2022; RUSLAN 2022). Kedua konflik ini bukan hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan ketegangan antar komunitas yang berlangsung lama, yang jika tidak ditangani secara sistematis dapat menghambat proses integrasi nasional yang berkelanjutan.

Kasus Ambon menunjukkan bagaimana absennya strategi integrasi sosial jangka panjang dan dominasi pendekatan keamanan justru menciptakan integrasi semu yang rapuh dan berujung pada disintegrasi sosial (I. G. Sudjatmiko 2008). Namun demikian, proses rekonsiliasi yang terjadi setelahnya menjadi model penting bagi studi integrasi pascakonflik. Nilai-nilai lokal seperti *Pela Gandong* terbukti berperan sebagai fondasi bagi pendidikan multikultural dan rekonsiliasi antar komunitas Muslim dan Kristen (M.

Hasudungan 2022). Implementasi pendidikan damai yang berbasis budaya lokal ini diperkuat oleh peran institusi lintas iman seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang aktif membangun kepercayaan antarumat melalui dialog rutin dan penyelesaian sengketa sosial berbasis komunitas (Ansori & Rostineu, 2018).

Berbeda dengan Ambon, konflik di Kabupaten Sanggau banyak dipengaruhi oleh dinamika struktural seperti transmigrasi, perebutan lahan, serta marginalisasi budaya lokal suku Dayak. Penelitian oleh Penot, Geissler and Babin, (2004) menunjukkan bahwa kebijakan konsesi pertanian di Sanggau memicu konflik agraria karena ketidakjelasan hak atas tanah adat dan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal. Situasi ini menciptakan ketegangan etnis dan memperkuat ketidakpercayaan antar kelompok, yang pada akhirnya melemahkan ketahanan sosial masyarakat. Kedua kasus ini menunjukkan pentingnya strategi integrasi nasional yang tidak hanya mengandalkan pendekatan dari atas (*top-down*), tetapi juga mengakui dan mengadopsi nilai-nilai lokal sebagai kekuatan kohesi sosial.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Setara Institute mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah pascakonflik cenderung memiliki indeks toleransi sosial yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Sementara itu, Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang dirilis BPS pada 2023 menunjukkan skor rendah pada indikator kepercayaan antarwarga dan partisipasi sosial di wilayah-wilayah dengan riwayat konflik (Ruslan 2022). Kondisi ini menguatkan urgensi perlunya perhatian terhadap aspek sosial dan ideologis dalam pembangunan nasional, terutama dalam konteks penguatan

Tabel 1. Perbandingan Lokus Penelitian di Ambon dan Sanggau

Aspek	Ambon	Sanggau
Riwayat konflik	Konflik agama (1999–2002)	Konflik etnis (Dayak-Madura, 1997–2001)
Keragaman	Tinggi (etnis dan agama)	Tinggi (etnis dan agama)
Intervensi negara	Tinggi (rekonsiliasi, pendidikan damai)	Sedang–tinggi (perbatasan, transmigrasi)
Nilai lokal	Pela Gandong sebagai alat integrasi	Hukum adat dan kearifan lokal komunitas Dayak
Potensi studi dokumen	Banyak (nasional dan internasional)	Cukup banyak (lokal dan kementerian)
Tantangan sosial saat ini	Polarisasi politik dan urbanisasi	Migrasi, pembangunan PLBN, dan agraria

Sumber: (Ernas 2018; A. N. Hasudungan 2022; Ruslan 2022; RUSLAN 2022)

ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting, untuk memahami bagaimana strategi integrasi nasional dapat bekerja secara efektif dalam konteks multikulturalisme pascakonflik, dengan melihat pengalaman konkret dari dua wilayah yang memiliki karakteristik konflik dan pemulihan sosial yang berbeda.

Penelitian ini secara spesifik memilih Ambon dan Sanggau sebagai lokus karena keduanya merepresentasikan dua pendekatan integrasi yang berbeda namun saling melengkapi. Ambon menunjukkan kekuatan integrasi sosial melalui nilai lokal dan harmoni antaragama (Ernas 2018), sedangkan Sanggau menggarisbawahi pentingnya keadilan agraria dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat sebagai prasyarat integrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan dinamika multikulturalisme dan ketahanan sosial di kedua wilayah; (2) menganalisis strategi integrasi nasional yang telah diterapkan; dan (3) mengidentifikasi kontribusi kearifan lokal serta kebijakan negara dalam membangun kohesi sosial dan mencegah disintegrasi.

Secara teoritis, kajian ini memadukan tiga pendekatan utama. Pertama, teori multikulturalisme (Kymlicka 1995; Parekh 2000) yang menekankan bahwa pengakuan atas identitas dan hak budaya minoritas merupakan bagian dari demokrasi yang adil dan inklusif. Kedua, teori ketahanan sosial (Buzan 1991; UNDP 2009) yang

melihat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi tekanan sosial sebagai elemen penting dalam ketahanan nasional. Ketiga, teori perubahan sosial (Giddens 1990) yang digunakan untuk membaca transformasi sosial yang terjadi akibat modernisasi, pembangunan ekonomi, dan globalisasi.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas isu multikulturalisme dan rekonsiliasi sosial di wilayah pasca-konflik di Indonesia, terutama di Ambon. Penelitian oleh M. Hasudungan, (2022) menyoroti peran nilai-nilai lokal Pela Gandong sebagai model pendidikan multikultural di sekolah pasca-konflik di Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi nilai budaya lokal mampu menjadi medium rekonsiliasi antara pelajar Muslim dan Kristen melalui kegiatan bersama dan pertukaran guru lintas agama oleh M. Hasudungan, (2022). Namun, fokus penelitian ini terbatas pada ruang pendidikan dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan strategi integrasi nasional atau ketahanan sosial dalam skala yang lebih luas. Di sisi lain, (Sudjatmiko 2008) menelusuri akar konflik Ambon dari kegagalan negara dalam membangun strategi reintegrasi pasca-reformasi. Sudjatmiko, (2008), menyoroti keterlibatan aparat dalam konflik dan absennya pendekatan jangka panjang dalam mengelola keberagaman, yang menyebabkan integrasi semu dan rawan pecah kembali. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengeksplorasi kontribusi nilai lokal

atau proses integrasi sosial berbasis komunitas secara mendalam.

Selain itu, (Ansori and Rostineu 2018)) mengkaji peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Ambon sebagai lembaga interfaith yang dapat mendorong rekonsiliasi melalui kerja sama lintas agama. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil dan negara untuk merawat kepercayaan sosial pasca-konflik (Ansori & Rostineu, 2018). Namun, kajian ini belum menggali secara mendalam dinamika ideologis dan struktur kekuasaan yang melatari konflik, terutama dalam konteks intervensi negara. Sementara itu, konteks Sanggau yang menghadirkan konflik etnis antara masyarakat Dayak dan pendatang Madura, banyak diangkat dalam studi agraria dan lingkungan. Penot et al. (2004), misalnya, membahas dampak kebijakan konsesi pertanian terhadap hak adat dan potensi konflik agraria. Mereka menunjukkan bahwa transmigrasi dan alokasi lahan tanpa partisipasi masyarakat lokal memicu eksklusi sosial dan konflik struktural (Penot et al., 2004). Namun, studi ini tidak menempatkan konflik tersebut dalam kerangka ketahanan sosial dan strategi integrasi nasional yang lebih luas.

Beberapa kajian seperti Ernas (2018) melihat bahwa integrasi sosial di Ambon dapat terjadi secara alami melalui interaksi ekonomi, konsensus politik, dan semangat keberagaman. Ia menyebut proses ini sebagai “harmoni aktif” yang menandai integrasi sosial pasca-konflik (Ernas, 2018). Namun, pendekatan tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum mengaitkan proses sosial tersebut dengan desain kebijakan ketahanan nasional yang lebih sistematis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi terdahulu bersifat sektoral

dan parsial, hanya menyoroti aspek budaya, kebijakan, atau konflik secara terpisah tanpa mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Terdapat beberapa research gap utama yang ingin dijawab: pertama, belum adanya pendekatan komparatif yang mengkaji dua wilayah pasca-konflik dengan akar masalah yang berbeda, agama di Ambon dan etnis di Sanggau, dalam satu kerangka integrasi nasional; kedua, minimnya studi yang memadukan dimensi nilai lokal, kebijakan negara, dan struktur sosial dalam satu pendekatan interdisipliner; ketiga, absennya sinergi analitis antara pendekatan bottom-up (nilai adat dan modal sosial) dan top-down (kebijakan negara) dalam membangun ketahanan sosial.

Kebaharuan penelitian ini menawarkan pendekatan komparatif yang menggabungkan dua konteks konflik dan strategi penyelesaiannya untuk merumuskan model integrasi nasional berbasis lokal. Penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual interdisipliner, multikulturalisme (Kymlicka, Parekh), ketahanan sosial (Buzan, UNDP), dan perubahan sosial (Giddens) untuk menganalisis integrasi pasca-konflik secara holistik. Lebih jauh, penelitian ini menempatkan nilai-nilai lokal seperti Pela Gandong dan hak ulayat sebagai bagian dari sistem ideologis yang dapat mendukung kohesi sosial nasional. Dalam konteks meningkatnya polarisasi sosial-politik di Indonesia, pendekatan yang menggabungkan nilai lokal dengan kebijakan formal seperti ini menjadi penting untuk memastikan strategi integrasi nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

empiris dan konseptual bagi penyusunan kebijakan sosial yang lebih peka terhadap konteks lokal, sekaligus memperkuat strategi integrasi nasional berbasis nilai-nilai multikultural dan ketahanan sosial. Hasil dari studi ini juga diharapkan menjadi acuan dalam penguatan kohesi sosial di wilayah-wilayah majemuk lainnya, baik di tingkat nasional maupun lokal, khususnya dalam merespons perubahan sosial di era pasca-konflik dan pasca-otonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ganda (*multiple case study*) untuk menganalisis dinamika multikulturalisme dan strategi integrasi nasional dalam memperkuat ketahanan sosial di dua wilayah pascakonflik, yaitu Kota Ambon di Provinsi Maluku dan Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan kedua wilayah ini didasarkan pada karakteristik sosial yang multikultur, sejarah konflik komunal atau etnis, serta upaya integrasi sosial yang mencerminkan pendekatan berbeda antara rekonsiliasi berbasis nilai lokal dan penanganan konflik struktural. Penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa wawancara langsung, melainkan sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi yang valid dan kredibel (Agustianti et al. 2022).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen kebijakan pemerintah (laporan dari BNPT, BPIP, Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Sosial), publikasi lembaga riset nasional dan internasional (BRIN, LIPI, UNDP, CRS, dan Setara Institute), artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu dari universitas lokal, serta berita daring dari media nasional dan daerah (Ambon Ekspres, Pontianak Post, dan Kompas). Rentang data yang dianalisis

mencakup periode antara tahun 1997 hingga 2024, untuk menangkap perkembangan dinamika konflik, rekonsiliasi, dan integrasi sosial secara historis dan kontemporer (Anggito and Setiawan 2018).

Untuk mengorganisasi, mengkode, dan menganalisis data sekunder yang terkumpul, penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus (Edwards-Jones 2014; Pan and Tang 2020). Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, dimulai dengan proses coding terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data seperti multikulturalisme, ketahanan sosial, nilai lokal, rekonsiliasi, dan strategi integrasi nasional. Setelah itu, dilakukan kategorisasi dan pemetaan tematik antarwilayah untuk membandingkan pola-pola integrasi sosial di Ambon dan Sanggau. NVivo 12 Plus memfasilitasi peneliti dalam mengelola volume data yang besar, menelusuri hubungan antar tema, serta menampilkan visualisasi matriks dan word frequency yang membantu dalam interpretasi data secara mendalam dan sistematis.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen (pemerintah, akademik, media, dan LSM) guna menghindari bias interpretatif. Selain itu, interpretasi data dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik lokal masing-masing wilayah, sehingga hasil analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga kontekstual dan reflektif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana strategi integrasi nasional bekerja dalam kerangka multikulturalisme pascakonflik serta kontribusi nilai-nilai lokal terhadap ketahanan sosial di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kondisi Multikulturalisme Lokal

Multikulturalisme di Indonesia tidak hanya tercermin dalam data statistik keberagaman etnis dan agama, tetapi juga dalam dinamika sosial sehari-hari yang membentuk narasi identitas, interaksi antar kelompok, serta persepsi masyarakat terhadap perbedaan (Girsang, Matsuda, and Yamamoto 2023). Hasil analisis data sekunder melalui NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa baik Kota Ambon maupun Kabupaten Sanggau merepresentasikan kompleksitas multikulturalisme yang khas dan berakar kuat dalam sejarah, struktur sosial, serta pengalaman kolektif masyarakatnya (Zaini 2013).

Di Kota Ambon, komposisi masyarakat didominasi oleh dua kelompok agama utama: Islam dan Kristen Protestan, dengan penyebaran yang relatif merata secara demografis. Etnis lokal seperti Ambon, Seram, dan Kei hidup berdampingan dengan etnis pendatang seperti Buton, Bugis, dan Jawa. Konflik komunal yang terjadi pada 1999–2002 menyebabkan segregasi sosial berbasis agama yang hingga kini masih terlihat dalam bentuk pemisahan wilayah pemukiman, sekolah, dan fasilitas ibadah. Namun demikian, Ambon juga menunjukkan upaya serius dalam merestorasi relasi sosial antar kelompok melalui pendekatan budaya dan spiritual (Sudjatmiko 2008; Turner 2009). Nilai-nilai kearifan lokal seperti *Pela Gandong* memainkan peran signifikan dalam memulihkan hubungan antar komunitas yang sempat retak. Narasi identitas lokal di Ambon kini dibangun kembali melalui pendidikan multikultural dan forum-forum lintas agama, dengan menekankan pentingnya hidup orang basudara (hidup bersaudara) sebagai landasan moral sosial. Identitas nasional, dalam hal ini,

diartikulasikan secara sinergis dengan nilai lokal, menjadikan Pancasila tidak sekadar ideologi negara, tetapi juga bagian dari nilai hidup sehari-hari.

Dalam proses coding tematik, ditemukan bahwa tema “komposisi etnis dan agama” termasuk salah satu node paling dominan, dengan lebih dari 45 referensi yang tersebar pada 17 sumber dokumen. Di Ambon, komposisi penduduk didominasi dua agama besar (Islam dan Kristen Protestan) yang secara spasial tersegregasi akibat dampak konflik 1999–2002. Analisis frekuensi kata menunjukkan bahwa istilah “*Pela Gandong*”, “*segregasi*”, dan “*kerukunan*” muncul berulang kali dalam laporan FKUB, laporan UNDP, dan arsip media lokal. Misalnya, dalam laporan (UNDP 2009), dikutip bahwa “...*kerukunan antarumat perlu terus dirawat melalui revitalisasi nilai Pela Gandong dalam kehidupan pendidikan dan kebijakan publik.*” Cuplikan ini dikode ke dalam node nilai lokal dan identitas sosial, yang saling terhubung melalui visualisasi node tree.

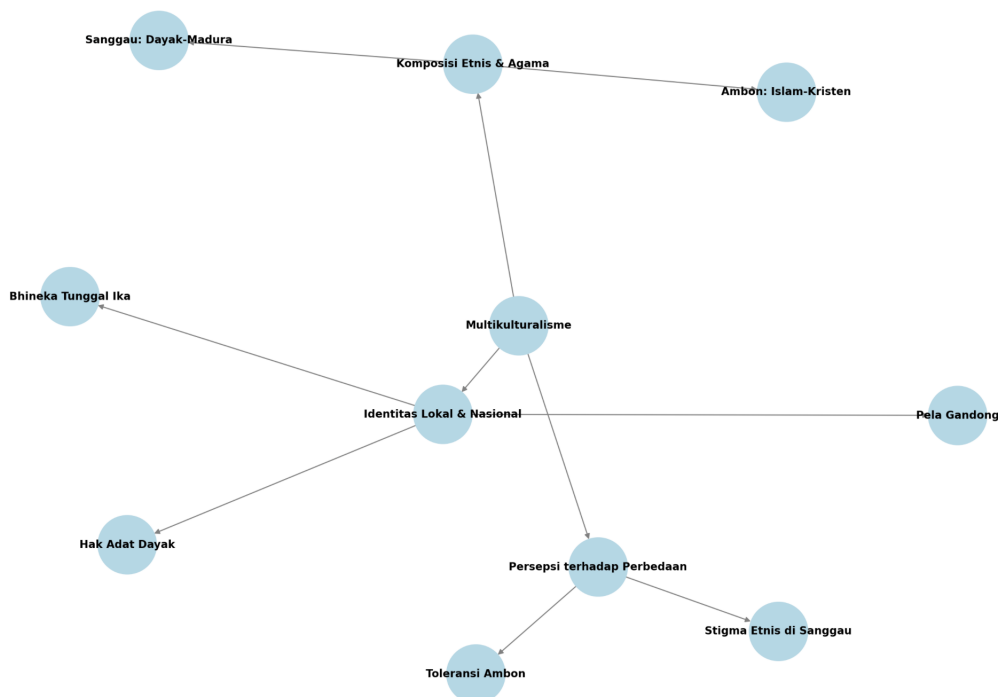
Sementara itu, di Kabupaten Sanggau, keberagaman masyarakat lebih didominasi oleh dimensi etnis. Etnis Dayak sebagai penduduk asli hidup berdampingan dengan etnis Melayu, Madura, Tionghoa, dan pendatang lainnya. Konflik etnis pada akhir 1990-an, terutama antara komunitas Dayak dan Madura, memperlihatkan adanya ketegangan struktural akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya seperti tanah dan pekerjaan. Narasi identitas lokal di Sanggau sangat dipengaruhi oleh wacana adat dan tanah ulayat, yang menjadi simbol eksistensi dan perlawanan terhadap marginalisasi. Sementara identitas nasional diterima secara formal, dalam praktiknya masih terdapat rasa ketidakadilan yang membuat masyarakat

adat mempertanyakan keberpihakan negara. Persepsi masyarakat terhadap perbedaan cenderung ambivalen, di satu sisi terbuka terhadap kerja sama lintas kelompok, namun di sisi lain masih dibayangi oleh trauma dan stereotip etnis yang melekat pascakonflik.

Di Sanggau, hasil coding mengungkap frekuensi tinggi pada node “etnisitas dan agraria” serta “identitas lokal vs nasional”, dengan lebih dari 30 kutipan relevan yang menggambarkan dominasi isu tanah adat dan transmigrasi sebagai pemicu fragmentasi sosial. Misalnya, dalam laporan Penot et al. (2004), disebutkan bahwa “... hak ulayat suku Dayak seringkali terabaikan dalam proses konsesi lahan, menimbulkan ketegangan antar kelompok penduduk asli dan pendatang.” Cuplikan ini dikode pada node marginalisasi budaya lokal dan konflik struktural, dan kemudian ditautkan dalam analisis perbandingan antarwilayah.

Berdasarkan visualisasi Node Tree hasil analisis NVivo 12 Plus yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa tema utama Multikulturalisme dalam konteks penelitian ini berkembang melalui tiga cabang utama: Komposisi Etnis & Agama, Identitas Lokal & Nasional, serta Persepsi terhadap Perbedaan. Masing-masing cabang tersebut memiliki subtema yang mencerminkan perbedaan karakteristik dan tantangan di wilayah studi, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Sanggau.

Pada cabang pertama, Komposisi Etnis & Agama, terlihat bahwa Ambon didominasi oleh identitas keagamaan yang kuat, yakni Islam dan Kristen, yang historisnya menjadi sumber ketegangan namun kini menjadi titik temu dalam proses rekonsiliasi. Sementara itu, Sanggau menampilkan dinamika etnisitas yang kompleks, khususnya antara suku Dayak dan Madura, yang dipengaruhi oleh sejarah migrasi dan konflik agraria. Visualisasi ini



Gambar 1. Node Tree Analysis Multikulturalisme di Ambon dan Sanggau
Sumber: Data diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2025

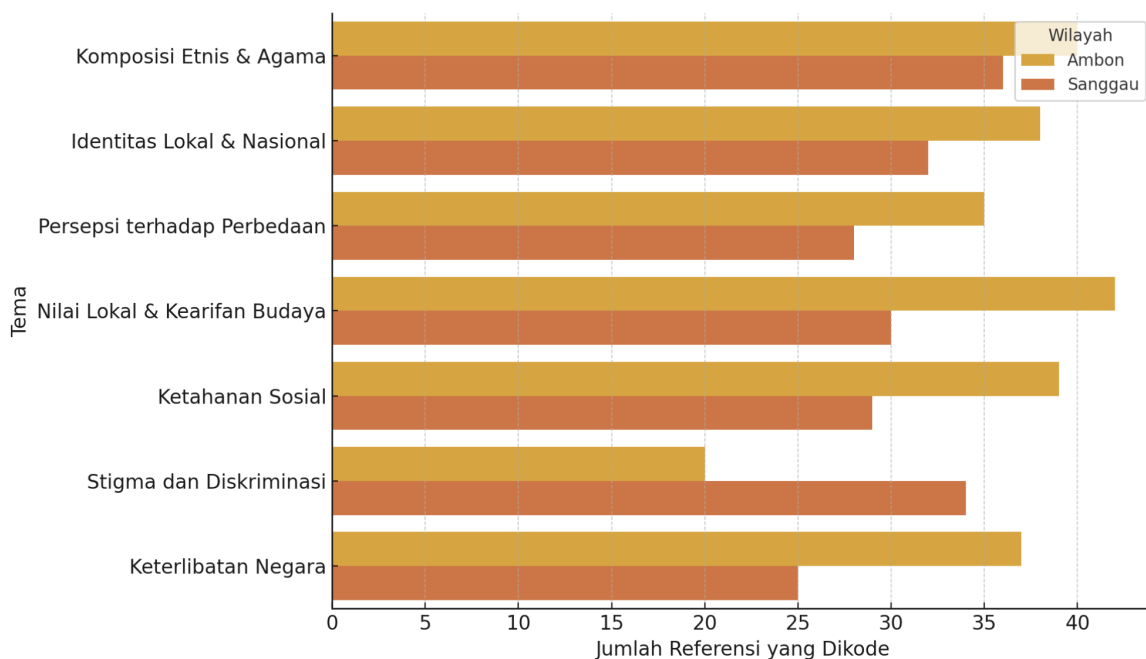
menunjukkan bahwa konflik di kedua wilayah bukan sekadar persoalan keberagaman, tetapi bagaimana keberagaman itu terhubung dengan identitas dan relasi kuasa.

Pada cabang kedua, Identitas Lokal & Nasional, node-node seperti Pela Gandong di Ambon dan Hak Adat Dayak di Sanggau mencerminkan peran nilai lokal dalam membentuk narasi identitas komunitas. Sementara itu, kehadiran node Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa identitas nasional berusaha dijalin melalui penguatan ideologi negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada penerjemahan lokal yang kontekstual. Di Ambon, identitas lokal dan nasional bersinergi melalui pendidikan damai dan forum kerukunan umat. Di Sanggau, identitas lokal cenderung resistif karena ketimpangan struktural dan marginalisasi.

Cabang ketiga, Persepsi terhadap Perbedaan, mengungkapkan dua arah yang kontras. Di satu sisi, Toleransi di Ambon menunjukkan hasil dari upaya

rekonsiliasi berbasis agama dan adat yang berhasil meningkatkan kepercayaan antar komunitas. Di sisi lain, Stigma Etnis di Sanggau memperlihatkan bahwa trauma konflik dan stereotip terhadap kelompok tertentu masih menjadi penghambat kohesi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi sosial sangat dipengaruhi oleh sejarah kekerasan dan keberhasilan atau kegagalan strategi integrasi nasional.

Hubungan antar node juga menunjukkan adanya keterkaitan logis yang penting bagi pembentukan framework analisis. Temuan ini menguatkan argumen bahwa strategi integrasi nasional yang berhasil harus bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis pada penguatan nilai-nilai lokal yang diakui oleh negara secara legal dan budaya. Dengan demikian, visualisasi node tree ini bukan hanya alat bantu analisis, tetapi juga refleksi konseptual dari kompleksitas hubungan antara keberagaman, identitas, dan ketahanan sosial di Indonesia.



Gambar 2. Analisis Matix Coding Comparison antarwilayah bersasarkan tema
Sumber: Data diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2025

Visualisasi Matrix Coding Comparison di atas menggambarkan intensitas kemunculan tema-tema utama dari analisis NVivo 12 Plus dalam dokumen-dokumen terkait Kota Ambon dan Kabupaten Sanggau. Secara umum, terlihat bahwa Ambon memiliki frekuensi lebih tinggi pada tema “Nilai Lokal & Kearifan Budaya”, “Ketahanan Sosial”, dan “Keterlibatan Negara”. Hal ini mencerminkan bahwa narasi rekonsiliasi dan integrasi sosial di Ambon sangat ditopang oleh kekuatan nilai-nilai lokal seperti Pela Gandong, lembaga adat seperti Saniri, serta sinergi dengan institusi negara dan organisasi lintas agama seperti FKUB. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa strategi integrasi di Ambon bersifat partisipatif dan berbasis budaya.

Sebaliknya, Sanggau menunjukkan skor lebih tinggi pada tema “Stigma dan Diskriminasi”, yang mengindikasikan masih kuatnya sekat sosial dan stereotip terhadap kelompok tertentu, khususnya komunitas pendatang pascakonflik etnis. Rendahnya skor pada tema “Keterlibatan Negara” dan “Ketahanan Sosial” menunjukkan bahwa upaya integrasi sosial di Sanggau belum sepenuhnya difasilitasi secara sistematis, baik oleh kebijakan publik maupun penguatan nilai lokal seperti hukum adat Dayak yang belum terlembagakan secara utuh.

Tema seperti “Komposisi Etnis & Agama” dan “Identitas Lokal & Nasional” muncul cukup tinggi di kedua wilayah, menandakan bahwa isu identitas tetap menjadi elemen utama dalam konstruksi sosial pascakonflik. Namun, pendekatan terhadap identitas di Ambon lebih berorientasi pada harmoni dan kolaborasi, sedangkan di Sanggau masih didominasi oleh narasi resistensi dan ketimpangan struktural. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bahwa strategi integrasi nasional yang

berhasil harus mempertimbangkan konteks lokal, memperkuat peran nilai budaya, dan melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya mengandalkan pendekatan struktural dari atas.

Ketahanan Sosial Pasca Konflik / Pasca Migrasi

Ketahanan sosial merupakan elemen penting dalam menjaga keutuhan masyarakat multikultur, terutama di wilayah yang pernah mengalami konflik atau tekanan sosial akibat migrasi dan perubahan struktural. Berdasarkan hasil analisis data sekunder menggunakan NVivo 12 Plus, ditemukan perbedaan signifikan dalam pola-pola integrasi dan eksklusiantara Kota Ambon dan Kabupaten Sanggau. Di Ambon, integrasi sosial pascakonflik agama menunjukkan arah yang positif melalui pendekatan partisipatif dan kultural. Masyarakat secara kolektif membangun kembali jembatan sosial yang sempat runtuh, didukung oleh kehadiran lembaga lintas iman seperti FKUB serta revitalisasi nilai Pela Gandong sebagai instrumen perdamaian. Integrasi di Ambon menunjukkan model inklusif, di mana partisipasi warga lintas kelompok difasilitasi melalui kegiatan bersama, pendidikan damai, dan kebijakan lokal yang membuka ruang dialog antarumat.

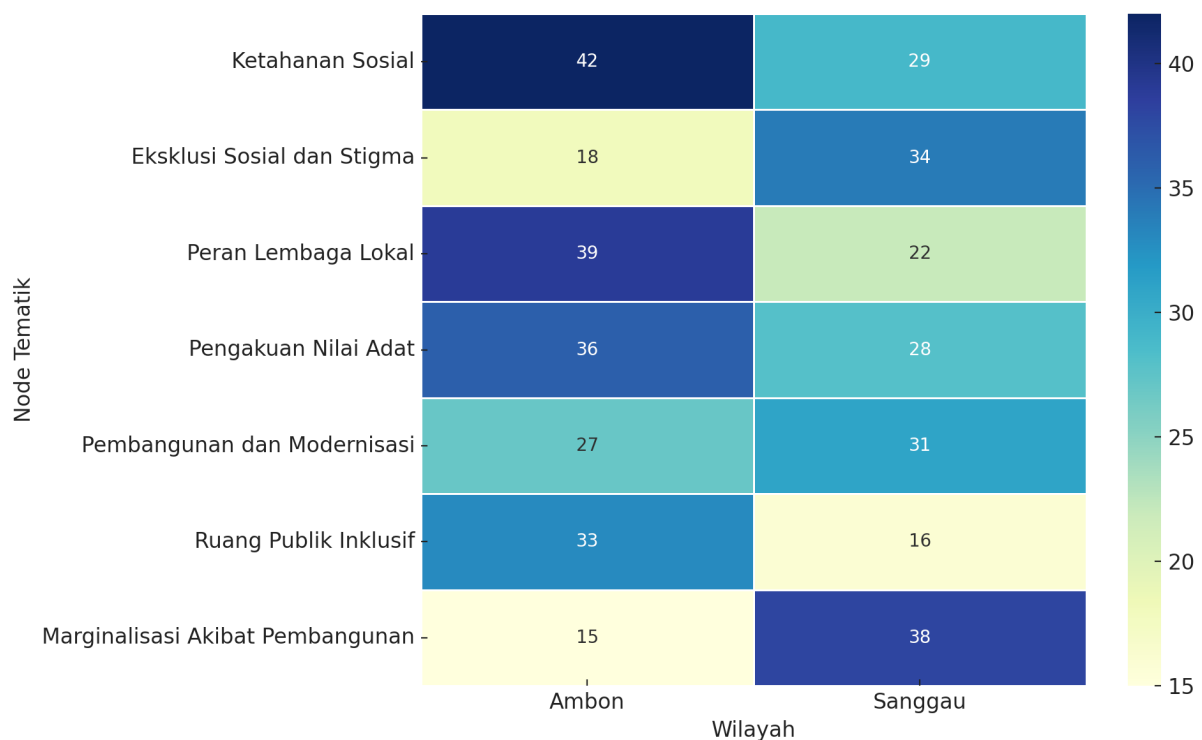
Sebaliknya, di Sanggau, proses integrasi sosial pascakonflik etnis berjalan lebih lambat dan tidak merata. Pola eksklusif masih tampak dalam bentuk stereotip terhadap etnis tertentu, terutama terhadap komunitas Madura yang sebelumnya terlibat dalam konflik horizontal. Masyarakat adat Dayak sering kali merasa bahwa hak-hak mereka atas tanah dan budaya belum sepenuhnya diakui oleh negara maupun korporasi. Hal ini diperkuat oleh hasil coding

tematik pada NVivo yang menunjukkan banyak referensi mengarah pada tema “ketidakadilan struktural”, “marginalisasi budaya”, dan “konflik agraria.” Ketahanan sosial di Sanggau masih bersifat terbatas karena belum kuatnya jembatan sosial antar kelompok, minimnya forum rekonsiliasi, serta lemahnya penguatan nilai lokal dalam kerangka hukum dan kebijakan daerah.

Dalam aspek peran masyarakat sipil, adat, dan lembaga agama, Ambon lebih menonjol sebagai wilayah yang berhasil membangun sinergi antar aktor lokal. Lembaga adat seperti Saniri dan komunitas keagamaan aktif terlibat dalam pendidikan damai, penyelesaian konflik kecil, dan menjaga komunikasi lintas kelompok. Di sisi lain, di Sanggau, lembaga adat memiliki peran simbolik yang kuat, namun kurang diberdayakan secara formal dalam sistem pemerintahan lokal, sehingga dampaknya terhadap integrasi sosial tidak

optimal. Beberapa inisiatif masyarakat sipil hadir melalui organisasi lokal dan gereja, tetapi masih bersifat sporadis dan tidak sistemik.

Dinamika sosial baru akibat pembangunan dan modernisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi ketahanan sosial di kedua wilayah. Di Ambon, pembangunan infrastruktur pascakonflik seperti fasilitas umum dan sekolah telah menjadi titik temu baru antar komunitas. Namun, modernisasi yang cepat juga menimbulkan tantangan baru seperti komersialisasi ruang publik yang belum sepenuhnya inklusif. Di Sanggau, pembangunan jalan dan ekspansi perkebunan telah mempercepat mobilitas penduduk dan akses ekonomi, tetapi juga memperuncing ketimpangan dan memperluas ketegangan antar kelompok, terutama akibat konflik lahan dan eksploitasi sumber daya yang tidak ramah pada struktur adat.



Gambar 3. Matrix Coding Query perbandingan Antar Wilayah

Sumber: Data diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2025

Berdasarkan visualisasi Matrix Coding Query pada gambar 3, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam distribusi tema-tema utama antara wilayah Ambon dan Sanggau. Di Ambon, jumlah kutipan tertinggi muncul pada node Ketahanan Sosial(42), Peran Lembaga Lokal (39), dan Ruang Publik Inklusif (33). Hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi pascakonflik di Ambon sangat ditopang oleh partisipasi aktif lembaga agama, tokoh adat, serta inisiatif-inisiatif sosial yang memfasilitasi interaksi lintas kelompok. Peran nilai-nilai lokal seperti Pela Gandong yang diformalisasi dalam forum masyarakat terbukti efektif dalam menciptakan ruang damai dan memperkuat kohesi sosial. Visualisasi ini juga mengonfirmasi bahwa ketahanan sosial di Ambon bukan semata hasil intervensi negara, melainkan terbangun dari kombinasi antara nilai budaya, struktur sosial lokal, dan dukungan kelembagaan.

Sebaliknya, di Sanggau, kutipan tertinggi terdapat pada node Eksklusi Sosial dan Stigma (34) serta Marginalisasi Akibat Pembangunan (38). Ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam membangun ketahanan sosial di wilayah ini berkaitan dengan persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama menyangkut akses terhadap lahan, pengakuan atas hak adat, dan dominasi pembangunan berbasis ekonomi tanpa mediasi budaya. Meskipun terdapat peningkatan pada node Pembangunan dan Modernisasi (31), hal ini belum disertai dengan penguatan Ruang Publik Inklusif (16), yang berarti ruang interaksi sosial antar kelompok masih terbatas. Rendahnya kutipan pada Peran Lembaga Lokal (22) di Sanggau mengindikasikan kurangnya pemberdayaan kelembagaan adat dalam mendukung proses integrasi sosial secara formal.

Perbandingan antarwilayah dalam matrix ini menunjukkan bahwa Ambon

merepresentasikan pendekatan integrasi berbasis komunitas dan budaya, sedangkan Sanggau masih menghadapi hambatan struktural yang menghambat rekonsiliasi jangka panjang. Heatmap ini memperkuat argumentasi bahwa strategi integrasi nasional tidak dapat diseragamkan, melainkan harus mempertimbangkan kekhasan sejarah konflik, kekuatan lokal, dan konfigurasi sosial yang ada di tiap daerah. Maka, pembentukan ketahanan sosial yang berkelanjutan harus melibatkan pengakuan hukum atas nilai lokal, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dan kebijakan pembangunan yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, ketahanan sosial pascakonflik tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya kekerasan fisik, tetapi oleh kemampuan masyarakat dan negara dalam membangun jembatan sosial, menghormati nilai lokal, dan mengelola perubahan sosial secara adil dan inklusif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa strategi integrasi nasional perlu menggabungkan pendekatan struktural dan kultural yang responsif terhadap konteks sosial masing-masing wilayah.

Strategi Integrasi Nasional

Strategi integrasi nasional merupakan upaya sistemik negara untuk memperkuat kohesi sosial dan memastikan keberlanjutan kebangsaan dalam masyarakat yang multikultur. Dalam konteks pascakonflik dan pascamigrasi di Kota Ambon dan Kabupaten Sanggau, intervensi negara dilakukan melalui berbagai program seperti pendidikan damai, pelatihan toleransi, serta revitalisasi nilai-nilai ideologi negara, terutama Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan hasil analisis data sekunder dengan NVivo 12 Plus, terlihat bahwa bentuk dan efektivitas

intervensi ini sangat bergantung pada konstelasi lokal, kesiapan lembaga, serta keterlibatan komunitas.

Di Ambon, strategi integrasi nasional menunjukkan efektivitas tinggi karena bersinergi dengan kekuatan nilai lokal seperti Pela Gandong dan struktur adat seperti Saniri. Negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui program konkret seperti pendidikan multikultural di sekolah, fasilitasi forum lintas agama oleh FKUB, dan dukungan terhadap aktivitas sosial yang melibatkan kedua komunitas mayoritas, Muslim dan Kristen. Sebuah kutipan dari laporan UNDP-yang dikode dalam NVivo menyebutkan: “Pendidikan damai berbasis lokal menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun kembali kepercayaan antar komunitas.” Intervensi negara dalam bentuk pelatihan guru, kurikulum toleransi, serta pendanaan untuk forum sosial memperkuat proses rekonsiliasi yang telah tumbuh secara organik dari masyarakat bawah (bottom-up).

Sebaliknya, di Sanggau, pendekatan negara masih cenderung teknokratik dan administratif. Intervensi seperti pembangunan infrastruktur, program transmigrasi, dan pengelolaan sumber daya tidak selalu diiringi dengan pendekatan budaya atau penguatan kapasitas sosial masyarakat. Revitalisasi ideologi Pancasila, misalnya, hadir dalam bentuk formal seperti ceramah kebangsaan, namun belum menyentuh dimensi pengalaman sosial masyarakat adat secara substantif. Dalam laporan BRIN-yang dikode dalam node ketimpangan kebijakan, disebutkan bahwa: “Kebijakan integrasi cenderung menempatkan masyarakat adat sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pengambil kebijakan.” Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam forum-forum resmi dan

melemahnya rasa memiliki terhadap agenda integrasi nasional.

Selain negara, media, pendidikan, dan lembaga lokal juga berperan penting dalam membentuk narasi kebangsaan dan mendukung proses integrasi. Di Ambon, media lokal seperti Ambon Ekspres aktif menyoroti kegiatan damai, mengangkat tokoh-tokoh lintas iman, dan mempromosikan narasi “orang basudara.” Pendidikan formal dan informal dilengkapi dengan praktik rekonsiliasi simbolik, seperti festival budaya lintas agama dan kelas toleransi. Di Sanggau, peran media masih terbatas pada pemberitaan umum, sementara pendidikan kebhinekaan belum menyentuh isu konflik dan pluralisme secara langsung. Lembaga lokal seperti Dewan Adat Dayak sudah diakui secara hukum daerah, tetapi belum sepenuhnya diberdayakan dalam proses pembangunan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi integrasi nasional sangat bergantung pada kontekstualisasi lokal, kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil, serta pengakuan terhadap nilai dan struktur sosial yang telah ada. Untuk memperjelas hal ini, berikut disajikan tabel perbandingan antara pendekatan di Ambon dan Sanggau:

Tabel perbandingan 2 menunjukkan bahwa Kota Ambon memiliki pendekatan integrasi nasional yang lebih efektif dibandingkan Kabupaten Sanggau, karena adanya sinergi antara intervensi negara, nilai lokal, dan partisipasi masyarakat sipil. Intervensi negara di Ambon tidak hanya bersifat formal, tetapi dikontekstualisasikan dalam kerangka budaya lokal melalui pendidikan damai, pelatihan toleransi, dan penguatan forum lintas agama seperti FKUB. Penerapan kurikulum multikultural dan pelibatan guru-guru lintas iman menunjukkan

Tabel 2 Studi Perbandingan Efektivitas Pendekatan Integrasi Nasional

Aspek Strategis	Kota Ambon (Maluku)	Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat)
Intervensi Negara	Pendidikan damai, pelatihan toleransi, dukungan FKUB dan kurikulum multikultural	Ceramah kebangsaan, pembangunan infrastruktur, program transmigrasi
Pendekatan Ideologi	Revitalisasi Pancasila melalui kearifan lokal dan simbol damai budaya	Penyampaian ideologi formal; kurang terhubung dengan nilai dan narasi lokal
Peran Pendidikan	Kurikulum damai, pelatihan guru lintas iman, kelas toleransi	Terbatas pada pelajaran formal; minim pelatihan guru atau pendidikan damai
Peran Media	Aktif mengangkat narasi damai, tokoh lintas agama, dan nilai Pela Gandong	Dominan bersifat informatif; minim kampanye toleransi atau antistigma
Peran Lembaga Lokal/ Adat	Saniri dan Pela Gandong menjadi basis rekonsiliasi dan kohesi sosial	Dewan Adat Dayak masih lemah dalam pengaruh formal dan peran dalam kebijakan
Efektivitas Integrasi Nasional	Tinggi: partisipatif, berbasis lokal, dan didukung kelembagaan sosial	Sedang–rendah: top-down, simbolik, belum mengakar pada masyarakat adat

Sumber: (Muslem 2024; Ruslan 2022; Suharno and Milwan 2020)

pendekatan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat efektivitas strategi integrasi nasional, karena negara hadir bukan sebagai dominator, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung kekuatan sosial-budaya lokal.

Sebaliknya, di Sanggau, strategi integrasi masih bersifat top-down dan cenderung simbolik. Intervensi negara lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan transmigrasi, yang dalam banyak kasus justru memperkuat ketimpangan dan ketegangan sosial antar kelompok. Revitalisasi ideologi Pancasila di Sanggau belum menyentuh dimensi budaya dan tidak terhubung dengan narasi-narasi lokal, sehingga kurang efektif dalam membangun rasa memiliki terhadap identitas kebangsaan. Pendidikan kebhinekaan masih terbatas pada kurikulum formal, tanpa pelatihan guru atau program khusus untuk menyentuh isu pascakonflik dan toleransi. Peran media juga tidak diarahkan sebagai agen rekonsiliasi, melainkan hanya bersifat informatif.

Peran lembaga lokal seperti Saniri dan Pela Gandong di Ambon terbukti menjadi kekuatan sosial yang konkret, karena mereka bukan hanya simbol budaya, tetapi juga berfungsi sebagai struktur sosial yang aktif dalam merawat perdamaian dan membangun

jembatan antar komunitas. Di Sanggau, Dewan Adat Dayak masih lemah dalam struktur formal, dan belum diberdayakan secara maksimal dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan. Hal ini menyebabkan partisipasi komunitas adat terbatas, dan integrasi yang dibangun cenderung bersifat administratif, bukan kultural.

Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bahwa efektivitas integrasi nasional sangat ditentukan oleh kombinasi antara pendekatan struktural (kebijakan negara) dan kultural (nilai lokal). Ambon dapat dijadikan model pendekatan integratif berbasis lokal yang partisipatif, sedangkan pengalaman Sanggau menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan integrasi yang tidak memperhatikan konteks sosial-budaya hanya akan memperdalam fragmentasi dan resistensi sosial. Ke depan, strategi integrasi nasional perlu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah agar tidak terjebak dalam pendekatan yang seragam namun tidak relevan.

Nilai Lokal sebagai Pilar Kohesi

Dalam konteks masyarakat pascakonflik yang multikultural, nilai-nilai lokal memainkan peran krusial sebagai jembatan sosial untuk membangun kembali kepercayaan, solidaritas,

dan identitas kolektif. Kearifan lokal seperti Pela Gandong di Ambon dan hukum adat Dayak di Sanggau bukan hanya representasi budaya warisan nenek moyang, tetapi juga sistem sosial yang hidup dan fungsional dalam mengelola konflik, membentuk struktur relasi, dan menjaga harmoni antar kelompok. Di tengah tantangan integrasi nasional yang kerap bersifat top-down dan seragam, nilai lokal menawarkan pendekatan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berakar dari kebutuhan sosial masyarakat.

Namun, efektivitas nilai lokal dalam memperkuat kohesi sosial sangat bergantung pada bagaimana negara mengakui, memfasilitasi, dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan formal. Dalam beberapa kasus, kearifan lokal berhasil menjadi instrumen rekonsiliasi yang didukung negara. Di kasus lain, nilai lokal justru bertabrakan dengan kebijakan pembangunan yang mengabaikan konteks budaya, sehingga menimbulkan resistensi dan konflik baru. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut relasi antara nilai lokal dan kebijakan nasional dalam membentuk kohesi sosial, berikut disajikan tabel perbandingan antara Ambon dan Sanggau sebagai dua wilayah dengan latar belakang konflik dan struktur budaya yang berbeda.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai lokal memiliki peran strategis dalam membentuk

kohesi sosial, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara mengakui dan mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam kebijakan nasional. Di Ambon, nilai lokal Pela Gandong memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam merekatkan hubungan antarumat Islam dan Kristen pascakonflik. Nilai ini tidak hanya hidup dalam praktik masyarakat, tetapi juga secara aktif diadopsi oleh negara dalam berbagai program pendidikan damai, pelatihan toleransi, dan forum kerukunan lintas agama. Status pengakuannya pun relatif tinggi, karena diakui dan didukung melalui kebijakan pendidikan dan sosial, baik oleh pemerintah daerah maupun nasional. Akibatnya, Pela Gandong berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan kohesi sosial yang stabil dan memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif.

Sebaliknya, di Sanggau, nilai lokal Hukum Adat Dayak juga memiliki fungsi sosial yang penting, terutama dalam mengatur relasi antarwarga, distribusi sumber daya, dan penyelesaian sengketa adat. Namun, nilai ini belum memperoleh dukungan penuh dari kebijakan nasional, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengakuan hak ulayat. Pengakuan negara masih bersifat simbolik, seperti dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), namun belum efektif dalam implementasi kebijakan pembangunan atau agraria. Akibatnya, peran nilai lokal ini dalam

Tabel 3. Perbandingan Hubungan Nilai Lokal dan Kebijakan Nasional antara Ambon dan Sanggau

Aspek	Ambon	Sanggau
Nama Nilai Lokal	Pela Gandong	Hukum Adat Dayak
Fungsi Sosial	Membangun solidaritas antaragama (Islam– Kristen), rekonsiliasi pascakonflik	Mengatur relasi sosial, distribusi lahan, dan penyelesaian sengketa adat
Hubungan dengan Kebijakan Nasional	Terintegrasi dalam pendidikan damai, forum kerukunan, dan kegiatan lintas iman	Kurang diakui dalam kebijakan pertanahan dan pembangunan
Status Pengakuan Negara	Diakui dan difasilitasi dalam kebijakan pendidikan dan sosial	Pengakuan simbolik dalam Perda, tetapi lemah dalam implementasi nasional
Dampak terhadap Kohesi Sosial	Tinggi – memperkuat integrasi sosial dan toleransi lintas agama	Sedang – masih rentan terhadap konflik agraria dan eksklusi budaya

Sumber:(ASRIN 2024; Ruslan 2022; Turner 2009)

membangun kohesi sosial menjadi terbatas, dan wilayah ini tetap rentan terhadap konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan agraria dan eksklusi budaya.

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa nilai lokal akan efektif sebagai pilar kohesi sosial apabila diberi ruang legal, politik, dan sosial yang cukup oleh negara. Pengalaman Ambon menunjukkan keberhasilan sinergi antara nilai budaya dan kebijakan negara, sedangkan pengalaman Sanggau menunjukkan bahwa kearifan lokal yang tidak terakomodasi secara substansial justru berpotensi menjadi titik gesekan. Oleh karena itu, strategi integrasi nasional perlu memperlakukan nilai-nilai lokal bukan sebagai pelengkap formalitas, tetapi sebagai mitra utama dalam membangun integrasi dan ketahanan sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi integrasi nasional dalam konteks masyarakat multikultural pascakonflik sangat ditentukan oleh sinergi antara pendekatan negara dan kekuatan nilai lokal. Di Ambon, integrasi sosial berhasil dibangun melalui kombinasi intervensi negara, seperti pendidikan damai dan forum kerukunan umat beragama dengan revitalisasi nilai lokal Pela Gandong, yang telah terbukti efektif dalam merekatkan komunitas Muslim dan Kristen pasca konflik. Di sisi lain, Sanggau menunjukkan bahwa tanpa pengakuan substantif terhadap nilai lokal seperti hukum adat Dayak, strategi integrasi nasional cenderung bersifat simbolik dan top-down, sehingga menyisakan ketegangan struktural, khususnya dalam isu agraria dan representasi adat.

Temuan ini memperjelas bahwa ketahanan sosial tidak bisa dibangun hanya

melalui regulasi formal atau pembangunan fisik, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang menghargai keragaman, memperkuat narasi kolektif kebangsaan, serta membuka ruang partisipatif bagi komunitas lokal. Negara perlu menggeser perannya dari agen dominan menjadi fasilitator dan mitra strategis yang mengakui keberagaman sebagai aset, bukan hambatan.

Rekomendasi:

Pertama, penguatan pengakuan hukum terhadap nilai lokal: Negara perlu mengintegrasikan kearifan lokal secara substantif ke dalam kebijakan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan agraria. Pengakuan tidak boleh berhenti pada tingkat simbolik, tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi regulasi yang operasional dan partisipatif.

Kedua, desain kurikulum pendidikan multikultural berbasis lokal: Pemerintah daerah dan pusat perlu mengembangkan kurikulum pendidikan damai yang menyesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah lokal masing-masing wilayah, seperti integrasi Pela Gandong di Ambon atau hukum adat dalam pendidikan lokal di Sanggau.

Ketiga, revitalisasi forum dialog lintas komunitas: Masyarakat sipil dan lembaga negara perlu menghidupkan kembali forum-forum lintas agama dan etnis sebagai ruang bersama untuk membangun narasi integrasi yang setara, inklusif, dan saling menghormati.

Keempat, monitoring dan evaluasi berbasis komunitas: Strategi integrasi nasional perlu disertai mekanisme pemantauan dari bawah (bottom-up), agar setiap kebijakan dapat dinilai berdasarkan dampaknya terhadap komunitas lokal, bukan sekadar keberhasilannya secara administratif.

Kelima, penguatan kapasitas lembaga adat dan tokoh lokal: Lembaga adat dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di wilayah dengan sensitivitas multikultural dan sejarah konflik. Hal ini penting untuk menciptakan legitimasi sosial dan menghindari eksklusi kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiandi, R., L. Nussifera, L. Angelianawati, I. Meliana, and ... 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. books.google.com.
- Anggito, A., and J. Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. books.google.com.
- Ansori, M., and Rostineu. 2018. "Examining the Potential of Local Interfaith Institution in Conflict Prevention and Resolution in Indonesia: The Case of Forum for Religious Harmony (Forum Kerukunan Umat Beragama) of Ambon."
- ASRIN, Hadji Effendi. 2024. "Integrasi Sosial pada Masyarakat Plural di Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan."
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. edited by 2nd. Lynne Rienner Publishers.
- Edwards-Jones, Andrew. 2014. "Qualitative Data Analysis with NVIVO."
- Ernas, S. 2018. "From Conflict to Social Integration: A Lesson from Ambon-Maluku."
- Fauzi, Muhammad, Nunung Dwi Setiyorini, Hery Setyowati, Andry Irdyansah, and Ahmad Shofi Mubarok. 2025. *Pendidikan Multikultural: Teori, Praktik, Dan Transformasi Sosial*. Penerbit NEM.
- Gianyar, I. Made, and I. Wayan Gede Suacana. 2024. "Etno-Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13(2):463–72.
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Girsang, Wardis, Masahiko Matsuda, and Sota Yamamoto. 2023. "Dusung Agroforestry Systems on Ambon Island, Central Maluku, Indonesia: Sustainable Livelihoods, Land Property Rights, and Poverty Reduction." *Journal of Marine and Island Cultures*. doi: 10.21463/jmic.2023.12.3.12.
- Hasudungan, Anju Nofarof. 2022. "Pela Gandong Local Wisdom as Multicultural Education Model after the Ambon Conflict." *Journal of Social Sciences and Management Studies*. doi: 10.56556/jssms.v1i3.87.
- Hasudungan, M. 2022. "Pela Gandong Sebagai Instrumen Pendidikan Multikultural Pasca Konflik Ambon." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 11(2):144–60.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Muslem, Muslem. 2024. "Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Trauma Sosial Pasca-Konflik Di Ambon." *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 1(4):184–95.
- Pan, Hong, and Li Tang. 2020. "Qualitative Data Analysis in Chinese Social Science Studies—the Case of NVivo." *Data Analysis and Knowledge Discovery* 4(1):51–62.
- Parekh, Bhikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press.
- Penot, E., C. Geissler, and D. Babin. 2004. "Deforestation, Agricultural Concession

- Policies and Potential Conflicts in Sanggau District, West Kalimantan Province, Indonesia.”
- Ruslan, Ismail. 2022. “Kearifan Lokal Dan Moderasi Beragama Di Sanggau.”
- RUSLAN, ISMAIL. 2022. “Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.”
- Sudjatmiko. 2008. “Dinamika Sosial Pasca Konflik Ambon: Integrasi Semu Dan Disintegrasi Struktural.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11(3):205–22.
- Sudjatmiko, I. G. 2008. “Communal Conflict, State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia BT - Handbook of Security and Intelligence Studies.” Pp. 349–63 in.
- Suharno, and M. Milwan. 2020. “Revitalisasi Saniri Negeri Sebagai Strategi Ketahanan Sosial Budaya Di Maluku.” *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara* 10(1):119–34.
- Turner, Kathleen. 2009. “Competing Myths of Nationalist Identity: Ideological Perceptions of Conflict in Ambon, Indonesia.”
- UNDP. 2009. *Strengthening Social Cohesion in Post-Conflict Areas: Lessons from Ambon*. United Nations Development Programme.
- Zaini, Muhammad. 2013. “The Importance of Multikulturalism in Millenium Development Goals: A study of Resource Management and Poverty in Post-Suharto Ambon.”